Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
ISSN. 2442-6962
Vol. 13 No. 1 (2024)

Implementasi Kebijakan Kawasan Ramah Lansia Di Kabupaten Dharmasraya

M. Iqbal Sarabayan Pazka[1*], Desna Aromatica [2], Ria Ariany [3]
[1,2,3] Magister Administrasi Publik, Universitas Andalas
*Email korespondensi: pazkasarabayan@gmail.com

Abstrack: *The high number of elderly people, namely 7.01%, is the basis for the Dharmasraya Regency Government to make the elderly one of the regional problems that must be resolved. Based on the guidelines issued by the Central Government through the Ministry of Social Affairs, Dharmasraya Regency issued an Elderly Area Policy through the 2020-2024 Regional Medium Term Development Plan. The aim of this research is to describe and analyze the Implementation of the Elderly Dharmasraya Regency Policy. This research uses Edward III's theory, there are 4 variables that determine the success of implementing a policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research results show that characteristics within agencies, a clear division of tasks and responsibilities, and good coordination between agencies are key factors for achieving success. Despite the government's commitment to providing adequate funding, there are still potential problems in the allocation and use of funds that are not on target due to a lack of supervision and monitoring. So there needs to be concrete steps to improve coordination and ensure that all parties involved have effective communication channels*.

Keywords*: Dharmasraya Regency, Elderly Home, Policy Implementation*

Abstrak: Tingginya jumlah angka penduduk lanjut usia di Kabupaten Dharmasraya yakni sebesar 7,01%, menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjadikan persoalan lansia sebagai salah satu permasalahan daerah yang harus di prioritaskan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kemudian mengeluarkan Kebijakan mengenai Kawasan Ramah lansia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah pada Tahun 2020-2024. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Dharmasraya terkait kebijakan Kawasan Ramah Lansia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berlandaskan teori Edward III. Terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa karakteristik dalam badan-badan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi yang baik antar badan-badan menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun ada komitmen pemerintah untuk menyediakan pendanaan yang mencukupi, masih terdapat potensi masalah dalam alokasi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran karena kurangnya pengawasan dan monitoring. Maka perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki saluran komunikasi yang efektif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kabupaten Dharmasraya, Kawasan Ramah Lansia

PENDAHULUAN

Perjalanan hidup manusia setelah lahir memiliki alur berawal dari masa kehidupan sebagai anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, setelahnya menjalani masa dewasa yang produktif, hingga berlanjut memasuki masa lanjut usia. Penduduk lanjut usia atau Lansia adalah kelompok penduduk dengan usia yang telah mencapai 60 tahun ke atas (WHO, 2002), ataupun di beberapa negara maju menggunakan batasan usia 65 tahun ke atas baru dapat disebut lanjut usia (Adioetomo et al., 2018). Sejak Tahun 2012 hingga tahun 2035 nanti, Indonesia diperkirakan akan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara Tahun 2020 hingga di Tahun 2030. Hal ini telah mulai ditunjukkan saat ini dengan penyebaran jumlah penduduk usia produktif yang telah mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk usia anak-anak dan pada kategori lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar sebenarnya berdampak kepada ketersediaan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam usaha percepatan pembangunan nasional (Badan Pusat Statistik, 2022). Namun di satu sisi, juga akan memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan jumlah lansia secara global dan nasional, yang kemudian akan membawa implikasi yang luas dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Hasil Sensus Penduduk pada Tahun 2020, menunjukkan jika persentase lansia di Indonesia sudah hampir mencapai 10 persen, padahal empat puluh tahun sebelumnya hanya sekitar 5 persen. Setelah bonus demografi di

Indonesia usai sekitar tahun 2036, persentase lansia diprediksi akan semakin mengkuat mencapai sekitar di angka 16 persen. Hal ini didasarkan pada angka proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015 (BPS, Bappenas, dan UNFPA, 2018).

Sehingga disimpulkan persentase penduduk lansia akan terus membesar, bahkan di tahun 2045 nanti diperkirakan satu diantara lima penduduk Indonesia merupakan lansia. *World Health Organization* atau WHO mengeluarkan pedoman dalam merespons dua fenomena demografi penuaan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi tersebut dalam program kota ramah lanjut usia (*Aged Friendly Cities Guideline*). Hal ini perlu menjadi pertimbangan karena selain menjaga kualitas kesehatan penduduk lansia, mereka juga membutuhkan lingkungan sehat baik fisik maupun sosial yang mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan serta mempertimbangkan kapasitas dan tipe aktivitas lansia itu sendiri. Program tersebut memungkinkan lansia untuk mengakses bantuan pelayanan yang dibutuhkan, saling berinteraksi, dan tetap dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal (Vibriyanti, 2018).

Sejak dikumandangkan deklarasi kelanjutusiaan dalam pertemuan akbar kelanjutusiaan di Madrid Tahun 2012 lalu yang dikenal sebagai MIPAA 2012, dihadiri oleh 157 negara termasuk Indonesia menghasilkan tiga pilar penting deklarasi, yaitu Pertama, partisipasi penduduk lansia dalam pembangunan negara, Kedua peningkatan kualitas layanan kesehatan dan sosial (di tingkat dasar) dan terakhir, lingkungan yang mendukung lansia atau dikenal dengan istilah penuaan aktif (Uny et al., 2015). Pemerintah Indonesia kemudian melalui Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mencantumkan landasan pembangunan terkait dengan lansia, yaitu penyiapan kelanjutusiaan di berbagai aspek melalui lintas lembaga negara dengan mengeluarkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif). Dalam implementasi kebijakannya, Kementerian Kesehatan merespon hal tersebut melalui program Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2020-2024, kemudian Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan program bernama Bina Keluarga Lansia (BKL) akan melakukan pemberdayaan pada lansia potensial (mandiri) agar menjadi lansia tangguh. Disisi lain, Kementerian Sosial mengarahkan kebijakannya pada lansia yang non-potensial melalui program rehabilitasi sosial (progres lansia). Serta berbagai kebijakan lainnya yang dilakukan pemerintah dengan upaya mewujudkan lansia yang SMART sehingga tercipta kesejahteraan lansia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Untuk dapat menuai bonus demografi secara optimal, maka berbagai kebijakan perlu diimplementasikan pada tiga kategori penduduk, yaitu usia anak, usia produktif dan lansia (Yennita & Mardison, 2021). Pemerintah Pusat mulai mencanangankan dan membuat kebijakan tentang Ramah Lanjut Usia sesuai dengan kajian dan rekomendasi dari WHO tersebut. Dan pada akhirnya kebijakan tentang ramah lanjut usia di tetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia. Kebijakan Permensos ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah di provinsi, kabupaten atau kota untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di daerah masing-masing dengan inovasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial budaya daerah masing-masing. Pada daerah Provinsi Sumatera Barat, saat ini telah mulai memasuki fase bonus demografi, suatu kondisi dimana angka ketergantungan penduduk belum/tidak produktif terhadap penduduk produktif yang relatif rendah. Bonus demografi akan memberikan dampak yang penting jika diiringi dengan peningkatan produktivitas. Maka pada tahapan ini anak usia produktif yang berkualitas menjadi penting. Pada Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ke-5 Daerah yang memiliki jumlah Lansia tertinggi di Indonesia. Kemudian jika dilihat berdasarkan data Susenas Maret 2021 Badan Pusat Statistik Indonesia tentang “Persentase Lansia menurut Provinsi, Tipe

Daerah, dan Jenis Kelamin" tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat berada pada di urutan ke-8 di Indonesia dengan Persentase total sebesar 9,86 persen. Di Sumatera Barat Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,08 persen. Sementara sisanya 31,92 persen termasuk penduduk usia non produktif, yang terdiri dari 25,05 persen penduduk usia 0-14 tahun dan 6,87 persen penduduk 65 tahun ke atas. Dengan struktur umur tersebut, Sumatera Barat masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Sementara persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas) sebesar 10,81persen (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022). Berikut persentase Jumlah Lansia di Sumatera Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020.

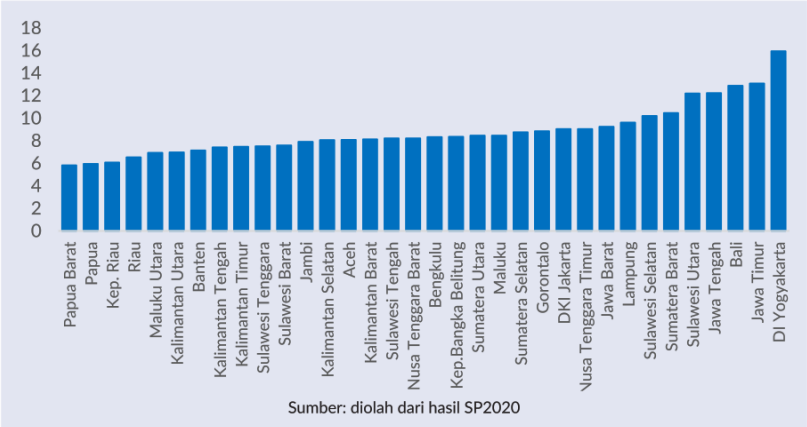

Gambar 1. Persentase Jumlah Lansia menurut Provinsi, 2020
Sumber: BPS Indonesia 2021

Dan setelah bonus demografi ini usai, Sumatera Barat juga akan memasuki era penuaan penduduk, pada masa tersebut lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif (SMART) adalah pilihan terbaik (Yennita & Mardison, 2021). Berdasarkan data-data statistik pertumbuhan jumlah lansia tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah Bersiap dengan menjadikan permasalahan lansia ke dalam perencanaan pembangunan yang tertuang pada Sub Bab pembahasan Permasalahan Pembangunan menurut urusan pemerintahan pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang membuat kebijakan untuk menangani permasalahan lansia tersebut adalah Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya menjadikan permasalahan pertumbuhan lansia sebagai salah satu masalah yang harus diprioritaskan diselesaikan dalam rencana pembangunan Daerah. Karena jika terus berlanjut, permasalahan lansia nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Pada penjabaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya, permasalahan lansia dibahas dalam Sub Bab Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tergabung dalam Kelompok Tribina, yang terdiri tiga aktivitas, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). Dan Kemudian Permasalahan tentang Lansia juga menjadi Indikator Masalah Daerah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya. Hal ini membuktikan komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasaraya dalam menangani permasalahan Pertumbuhan Lansia.

Kabupaten Dharmasraya juga memiliki *track record* yang bagus. Pada Tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya terpilih menjadi nominator pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional pada Tahun 2021. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia. Program yang mendapatkan Nominasi tersebut adalah Program Kampung Ramah Lansia yang dikemas dalam Program Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti (GL Pro Sasabesa) di Jorong Saiyo Sakato, Nagari

Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh. Program kampung ramah lansia atau yang didaftarkan dengan nama Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti (GL Pro Sasabesa) merupakan bentuk upaya membangun produktivitas kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia), melalui beberapa kegiatan seperti sekolah lansia, pertanian, kerajinan, kesehatan seni budaya dan lain sebagainya. Kemudian, Dinas SOSP3APPKB membuat kebijakan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Nomor : 188.46/48/KPTS/DINSOSP3APPKB/2022 Tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKLU) Dharmasraya sebagai Penerima Bantuan Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022. Kebijakan ini tentu menjadi suatu hal yang menarik untuk ditelaah secara mendalam. Karena pada dasarnya LKLU adalah sebuah lembaga Sosial yang bergerak pada bidang kesejahteraan sosial terutama tentang Penduduk Lanjut Usia. Pada dasarnya LKLU adalah lembaga yang legal yang disahkan oleh Kementerian Sosial RI. Pada tahun 2021 LKLU Gerai Kabupaten Dharmasraya mendapatkan Sertifikat Akreditasi langsung dari Kementerian Sosial RI pada 8 November 2021. Dan Sertifikat ini berlaku dari tanggal 8 November 2021 hingga 8 November 2026.

Keterkaitan Dinas SOSP3APPKB dan LKLU menjadi suatu hal yang menarik, karena kedua sama-sama bergerak dibidang kesejahteraan sosial dan sama-sama mempunyai program dan kegiatan dalam menangani penduduk lanjut usia. Dinas SOSP3APPKB merupakan OPD yang berada di bawah Pemerintah Daerah, sedangkan LKLU adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat, hal ini menimbulkan pertanyaan penelitian. Kebijakan Pemerintah Daerah berupa memberikan bantuan alat bantu, bantuan makanan, bantuan uang tunai, melaksanakan program kampung ramah lansia, dan pemberian dana hibah kepala LKLU merupakan fenomena empiris yang menarik bagi peneliti. Karena pada dasarnya secara teoritis keberhasilan mengimplementasi Kebijakan tentang Kawasan Ramah Lansia akan dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi implementasi tersebut adalah Komunikasi. Sesuai pemikiran oleh Edward III, bahwa komunikasi dalam penerapan kebijakan Kawasan Ramah Lansia dapat berjalan dengan baik karen melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan. Selain itu, Faktor Sumber Daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, serta faktor lainnya yang juga mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan tentang Kabupaten Ramah Lansia adalah Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi ini sangat penting karena pada kenyataannya terdapat dua Organisasi Pemerintah yaitu OPD dan Lembaga Kementerian yang membuat mengimplementasikan kebijakan ini. Tentu dalam hal ini harus ada status dan kedudukan yang jelas antara kedua organisasi pemerintah ini. Harus ada pembagian fokus dan lokus yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, serta agar penanganan mengenai lansia menjadi efektif dan efisien.

Penelitian terkait dengan masalah ini sudah sering dipublikasi misalnya Dinda dan Fitra (2017) meneliti tentang kesiapan kota metro menuju kota ramah lansia. Berdasarkan aspek demografi, jumlah penduduk lansia di sana menurut data lima tahun terakhir mengalami penurunan di tahun 2018 (BPS Kota Metro, 2019). Penurunan selaras dengan penurunan jumlah penduduk di Kecamatan Metro Pusat yang menunjukkan angka migrasi ke luar kota lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk yang datang. Untuk jumlah penduduk lansia di Kecamatan Metro Pusat tertinggi berada di Kelurahan Metro dengan total 2.339 jiwa. Hal ini sesuai letak administratif berada di pusat kota, sehingga mendorong adanya aktivitas yang lebih padat. Selain itu, pandangan bahwa keberadaan lansia yang selalu dikaitkan dengan rasio ketergantungan pada usia produktif telah dibuktikan dengan persentase jumlah lansia yang tidak bekerja hanya sebesar 14%, dengan jenis pekerjaan yang didominasi oleh profesi pensiunan dan ibu rumah tangga. Pertambahan usia seseorang menimbulkan penurunan fisik dan gangguan kesehatan. Artinya, angka tersebut menunjukkan bahwa produktivitas lansia di Kecamatan Metro Pusat sangat

tinggi dan terus berupaya dalam menggerakkan ekonomi keluarga tanpa bergantung dengan usia yang lebih muda (Dinda & Fitra, 2017).

Widowati,.etc (2018) juga mengkaji kota semarang menuju kota ramah lansia dan menghasilkan penilaian Kota Semarang dari 8 indikator Kota Ramah Lansia sesuai dengan standar WHO yaitu 8 indikator/dimensi yang memuat 95 variabel adalah 5 indikator yaitu indikator 2,4,5,7 dan 8 masuk dalam kategori "merah" yaitu 62,5% dan yang masuk dalam kategori "orange" yaitu indikator 1, 3 dan 6 yaitu 37,5%. Penelitian ini adalah tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019 yaitu pada Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2019, khususnya Poin 6 Penanggulangan Kemiskinan dan Poin 11 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pembangunan serta pada Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah, pada Urusan Wajib Kesehatan, poin K, telah mempunyai Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia (Widowati et al., 2018). Penelitian di tentang Denpasar Ramah Lansia memaparkan bahwa Diperkirakan pada tahun 2050, proporsi penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 25%. Hal ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi, layanan kesehatan yang merata, dan peningkatan kesadaran akan kesehatan. Usia harapan hidup meningkat diangka 70.5 tahun. *World Health Organization* (WHO) menetapkan delapan dimensi *age friendly community* yang dibutuhkan sebagai bentuk *support* bagi penduduk lansia. Dimensi ruang terbuka hijau, fasilitas transportasi, perumahan, serta kesempatan berpartisipasi sebagai warga sipil dan kesempatan kerja bagi lansia menjadi dimensi yang membutuhkan perhatian oleh Kota Denpasar untuk menuju lingkungan yang ramah lansia (Lestari, 2016).

Selanjutnya penelitian yang relevan dengan penelitian ini Meguwoharjo dengan judul "Tantangan Menuju Kota Ramah Lansia Kota Bandung" memaparkan bahwa lemahnya perhatian pemerintah kota Bandung terhadap 8 dimensi kota ramah lansia. Hampir ke delapan dimensi kota ramah lansia, kota Bandung memiliki persentase yang Kurang dan Sangat Kurang. Lemahnya dimensi kota ramah lansia kota Bandung terdapat pada dimensi gedung dan ruang terbuka, transportasi, partisipasi sosial, penghormatan dan inklusi/ keterlibatan sosial, partisipasi sipil dan pekerjaan, komunikasi dan informasi dan dimensi dukungan masyarakat dan pelayanan kesehatan (SurveyMETER, n.d.).

Vibriyanti (2018) menjelaskan bahwa Kota Surabaya memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat menyandang predikat kota ramah lansia karena adanya peraturan daerah, tersedianya kelompok/kelembagaan terkait lansia, dan komitmen kepala daerah yang tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh Kota Surabaya adalah fasilitas fisik yang kurang memadai, kondisi perumahan, dan kesempatan kerja bagi lansia. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kerja nyata dari segenap elemen kota, pemerintah dan pihak swasta(Vibriyanti, 2018). Penelitian terakhir yang relevan dengan penelitian ini adalah Erwanto dkk tahun 2020 dengan judul "Pengembangan Dusun Ramah Lansia Melalui Pelaksanaan Sekolah Lansia di Karet Kabupaten Bantul" yang menjelaskan bahwa tim Abdimas mengembangkan dusun Karet, kabupaten Bantul sebagai dusun ramah lansia karena memiliki jumlah persentase lansia besar yaitu sebesar 17,81 % serta memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dengan baik. Salah satu upaya untuk mencapai indikator tersebut adalah dengan membentuk sekolah lansia. Pelaksanaan sekolah lansia melibatkan berbagai pihak khususnya para remaja dan kader Kesehatan lansia untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan sekolah lansia. Adanya kontribusi dari lintas generasi (*intergenerational learning*) dapat menjadikan indikator terbentuknya sekolah lansia. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan peserta sekolah lansia sebesar 45,74 %, adanya peran serta dari lintas generasi (*intergenerational learning*) dan terbentuknya dusun ramah lansia di dusun Karet Bantul (Erwanto et al., 2020).

Studi yang dilakukan oleh Dinda dan Fitra (2017) tentang kota Metro yang menuju kota ramah lansia menyoroti pentingnya memperhatikan populasi lansia dalam perencanaan kota. Temuan mereka tentang penurunan jumlah penduduk lansia dan tingginya produktivitas lansia dapat memberikan landasan bagi penelitian di Kabupaten Dharmasraya. Evaluasi terhadap upaya pembangunan kota ramah lansia di kota-kota seperti yang dilakukan oleh Widowati dkk. (2018) dan Lestari (2016) menunjukkan pentingnya mempelajari pendekatan dan strategi yang telah berhasil diterapkan di tempat lain. Sementara itu, penelitian Meguwoharjo tentang Kota Bandung (tanpa tahun) menggarisbawahi kelemahan dalam dimensi kota ramah lansia, yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi area-area perbaikan di Kabupaten Dharmasraya. Studi Vibriyanti (2018) tentang Surabaya menekankan pentingnya komitmen pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mewujudkan kota ramah lansia, yang dapat menjadi model untuk dipelajari dan diterapkan di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, pendekatan konkrit yang diambil oleh Erwanto dkk. (2020) dalam pengembangan dusun ramah lansia di Kabupaten Bantul melalui pendidikan dan partisipasi lintas generasi memberikan inspirasi bagi potensi strategi yang dapat diadopsi di Kabupaten Dharmasraya. Kesimpulannya, penelitian-penelitian tersebut menyediakan kerangka kerja yang kuat dan relevan untuk mengeksplorasi dan merumuskan strategi pembangunan kota yang ramah terhadap lansia di Kabupaten Dharmasraya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang dipergunakan untuk menganalisis informasi yang telah diperoleh dan kemudian mengolahnya menjadi data yang dapat diinterpretasikan. Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati (Moeleong, 2013). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer yang berasal dari pelaksanaan wawancara dengan beberapa informan terkait berdasarkan *purposive sampling*, Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2009). Dan kemudian menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dokumentasi untuk memperkuat argumen penelitian. Penelitian ini dilakukan Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Silalahi, 2009). Kegiatan tersebut saling berkaitan dan menjadi suatu proses siklus pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan Burhan Bungin (Bungin, 2003). Kemudian dalam menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan Teknik triangulasi data penelitian. Keseluruhan data dan hasil analisa yang di dapatkan dibuat pada laporan pertanggung jawaban ilmiah dalam bentuk karya tulis ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah dalam menjalankan peran dan kewenangannya memimpin negara, membutuhkan pengelolaan kebijakan sebagai usaha dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kebijakan sendiri dianalogikan sebagai pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energi atau sistem penggerak dan kendali atau dimensi manajemen (Keban, 2008). Kemudian . Thomas R Dye mendefinisikannya sebagai *public policy is whatever governments choose to do or not do. Public Policy is What government do, why they do it, and what difference it makes* (Dye, 2013). Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2012). Terdapat beberapa

pengertian mengenai implementasi kebijakan menurut para ahli, salah satunya menurut para ahli, salah satunya menurut Lester dan Stewart Jr dimana ia mengatakan implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih (Agustino, 2020).

Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan *"Policy implementation encompasesses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policyyy decision"* (Widodo, 2010). Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu jawaban pemerintah dalam memberikan Solusi terhadap permasalahan negara yang sedang terjadi, baik bertindak atau tidak bertindak itu telah dapat dikategorikan sebuah kebijakan yang dihasilkan. Untuk penelitian ini, maka kebijakan ramah lansia merupakan jawaban atas persolahan bonus demografi penduduk yang terfokuskan untuk penduduk lanjut usia.

Bagian Implementasi kebijakan Kawasan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan lansia serta mengurangi risiko distabilitas. Dengan adanya implementasi kebijakan ini, diharapkan bahwa kualitas kesehatan para lansia akan terjaga secara signifikan, sehingga berdampak pada peningkatan penghematan biaya perawatan kesehatan. Permasalahan dalam implementasi kebijakan ramah lansia menjadi prioritas untuk dicarikan solusi oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dalam mengimplementasikan kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya, penting untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Hal ini mencakup pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga sosial, dan individu masyarakat. Selain itu, adanya kerja sama dengan pihak terkait seperti lembaga kesehatan dan lembaga penyedia pelayanan sosial juga menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ramah lansia. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan ramah lansia, Kabupaten Dharmasraya perlu meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara berbagai sektor terkait, seperti kesehatan, sosial, perencanaan teritorial, pembangunan infrastruktur, dan sumber daya manusia. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya adalah dengan memberikan fasilitas Puskesmas Santun lansia yang merupakan hasil kerja sama antar Lembaga untuk memberikan fasilitas Kesehatan yang baik dan nyaman untuk lansia di Kabupaten Dharmasraya. Menurut pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Agustino, 2020).

Komunikasi

Dimensi pertama yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya adalah komunikasi. Penting untuk memastikan terjadinya komunikasi yang efektif dan terbuka antara pemerintah daerah dengan semua pemangku kepentingan terkait dalam implementasi kebijakan ramah lansia. Menurut George C. Edwards III, komunikasi yang baik adalah kunci dalam mencapai kesepakatan dan koordinasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga sosial, dan individu masyarakat terkait implementasi kebijakan ramah lansia. Implementasi yang efektif dalam kebijakan ramah lansia membutuhkan komunikasi yang terbuka dan efektif antara semua pemangku kepentingan, sehingga informasi yang penting dapat diterima dengan baik dan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat kebijakan tersebut dapat terbentuk. Para pembuat keputusan harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dan mengapa itu penting untuk mencapai kebijakan ramah

lansia yang berhasil. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan baik jika terdapat saluran komunikasi yang jelas dan efektif antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks implementasi kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, lembaga penyedia pelayanan sosial, dan masyarakat adalah sesuatu yang harus menjadi fokus utama. Terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik dapat dilihat dari sejauh mana informasi mengenai kebijakan ramah lansia disampaikan kepada semua pemangku kepentingan terkait. Sering kali terjadi hambatan dalam transmisi informasi sehingga pesan tidak sampai dengan baik atau tidak sampai kepada pihak yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan ramah lansia. Beberapa tahapan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya yang melibatkan transmisi komunikasi antara lain adalah pengumpulan data mengenai lansia di wilayah tersebut, penentuan strategi implementasi, dan diseminasi informasi kepada masyarakat mengenai program-program yang akan dilakukan. Transmisi komunikasi yang efektif, jelas, dan konsisten sangat penting dalam implementasi kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya. Transmisi dari Sekda kepada Kepala Dinas SosP3AKB sangat jelas untuk penerapan kebijakan Bupati mengenai tindak lanjut penerapan Kawasan Ramah Lansia.

Komunikasi yang baik akan memastikan informasi yang tepat disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, seperti lembaga terkait, masyarakat, dan media. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kabupaten Dharmasraya, ditemukan bahwa transmisi komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait pendataan lansia belum berjalan dengan efektif. Banyak pihak yang masih belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pendataan lansia dan tujuan dari pendataan tersebut. Untuk meningkatkan transmisi komunikasi yang efektif, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya perlu mengadakan pertemuan dan sosialisasi secara reguler dengan lembaga terkait dan masyarakat agar informasi terkait dapat disampaikan dengan jelas dan tepat. Untuk memastikan observasi tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan terkait transmisi komunikasi dalam pendataan lansia di Kabupaten Dharmasraya. Seperti.

Wawancara dengan Ibu Dwi Andayani selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Dharmasraya menguatkan temuan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait pendataan lansia masih kurang efektif. Beliau mengatakan:

> *"...Kami menyadari bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait pendataan lansia di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan pertemuan secara rutin antara pemerintah daerah dan lembaga terkait. Dalam hal ini, transmisi komunikasi yang efektif sangat penting agar informasi terkait pendataan lansia dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Pentingnya transmisi komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam pendataan lansia di Kabupaten Dharmasraya menjadikan upaya meningkatkan komunikasi antar organisasi menjadi suatu yang penting dan prioritas." (Wawancara tanggal 24 Juli 2023)*

Hal ini juga dibuktikan dari masyarakat publik, selaku target implementasi kebijakan. Wawancara dengan salah seorang lansia yang belum terdata, beliau mengatakan:

> *"...Saya masih bingung karena tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk didata sebagai seorang lansia. Tidak ada petunjuk atau informasi yang diberikan kepada kami oleh Wali*

Nagari. Kami tidak tahu keuntungan apa yang bisa didapatkan dari pendataan ini dan cara untuk mendaftar." (Wawancara tanggal 27 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, strategi komunikasi yang tepat sangat penting dalam keberhasilan program Ramah Lansia. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait program Ramah Lansia dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya. Namun, dalam memastikan efektivitas komunikasi, pemerintah daerah perlu menjaga dan memperbaiki aliran informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa partisipasi sosial dan sipil pada lansia dapat terlaksana karena merupakan salah satu kriteria program Kawasan Ramah Lansia agar dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah, bekerja serabutan dan tinggal di daerah terpencil.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan mudah dipahami. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menyampaikan informasi yang akurat tentang daerah yang akan dibangun dapat mempengaruhi kesuksesan kebijakan tersebut dalam hal pendataan lansia di Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pesan-pesan kebijakan mengenai pendataan lansia di Kabupaten Dharmasraya disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Dalam implementasi kebijakan Ramah Lansia, kejelasan dan kemudahan pemahaman informasi sangat penting. Berdasarkan observasi peneliti, di Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Program Khusus untuk Layanan Kesehatan Lansia melalui Program Puskesmas Santun Lansia. Puskesmas ini memiliki fasilitas dukung untuk lansia seperti kursi roda, tempat duduk antri khusus lansia. Akan tetapi masih terdapat kendala mengenai pola komunikasi yang ada saat ini. Kendala tersebut diantaranya adalah penggunaan bahasa yang sulit dipahami oleh lansia, kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, serta kurangnya tanggapan dan responsivitas dalam menyelesaikan keluhan lansia khususnya dalam pemenuhan layanan kesehatan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan tidak bertentangan. Jika perintah yang diberikan tidak konsisten, maka akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pelaksana di lapangan. Dalam pendataan lansia, konsistensi dalam komunikasi sangat penting. Dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Ramah Lansia, diperlukan konsistensi dalam memberikan petunjuk dan instruksi kepada para tenaga lapangan agar dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan konsisten.

Secara keseluruhan, dalam implementasi kebijakan Kawasan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya yang dilihat dari dimensi komunikasi menurut George C. Edward III yang dilihat dari indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Dalam pelaksanaannya, komunikasi kebijakan perlu konsisten dan jelas agar dapat memberikan panduan yang akurat kepada para tenaga lapangan dalam melaksanakan kebijakan. Terkait dengan Kriteria Kawasan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya sudah cukup baik namun belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, kriteria yang sudah ada di kabupaten Dharmasraya berdasarkan variabel komunikasi pada Teori Edward III meliputi:

a. Memiliki kebijakan kelanjutusiaan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data yang didapatkan oleh peneliti. Peneliti menganalisa bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Dharmasraya sudah cukup tepat dengan mencantumkan Kawasan Ramah Lansia di dalam RPJMD 2020-2024 Kabupaten Dharmasraya dan di terjemahkan dalam Renstra Dinas SosP3AKB sebagai leading sektor dalam mengelola kebijakan tersebut. Program-program penunjang pun telah diberikan landasan hukum berupa Peraturan Bupati terkait Lansia. Agar lebih optimal, tentu program dan kebijakan tersebut dapat ditambahkan khususnya dalam pemberian layanan Kesehatan dengan memberikan pelatihan pada tenaga Kesehatan untuk melayani khusus lansia melalui lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, serta memberikan program khusus berupa Pendidikan formal khusus lansia melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan.

b. Penghormatan dan Inklusi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari peneliti. Peneliti menganalisa bahwa penghormatan yang ada di Kabupaten khususnya terhadap lansia sudah sangat baik karena adanya pengaruh budaya ketimuran khususnya Adat Minangkabau yang sangat respek terhadap orang tua dan kaum lansia. Akan tetapi pada aspek inklusi sosial, masih belum optimal karena aksesibilitas Pendidikan formal maupun non formal masih sulit diakses oleh para lansia.

c. Partisipasi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, peneliti menganalisa bahwa partisipasi sosial pada lansia sudah berjalan dengan baik berkat adanya pendampingan dari pemerintah daerah melalui dinas terkait, pemerintah nigari maupun LKLU. Namun ada Sebagian lansia yang memang tidak mau aktif berpartisipasi karena berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu rendahnya kesadaran diri (apatis), pendidikan, kualitasi hidup, pendapatan ekonomi. Lansia yang memiliki partisipasi sosial yang aktif Sebagian besar merupakan kelompok lansia produktif yang berasal dari kalangan berpendidikan, pensiuan ASN atau BUMN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan memiliki ekonomi yang menengah keatas.

d. Partisipasi Sipil

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menganalisa partisipasi sipil pada lansia. Menurut Analisa peneliti, bahwa partisipasi sipil lansia di kabupaten telah optimal. Lansia memiliki identitas diri dan diakui eksistensinya serta memiliki partisipasi yang cukup aktif dalam kegiatan pemilu.

e. Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Analisa peneliti bahwa dukungan komunitas dan pelayanan sosial masih belum optimal dan perlu ditingkatkan karena adanya Kabupaten Dharmasraya memiliki perbedaan karakter dan multi etnis menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, pemerintah nigari dan LKLU dalam memberikan layanan sosial di Kabupaten Dharmasraya.

f. Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, peneliti menemukan bahwa dukungan layanan Kesehatan pada lansia melalui program puskesmas santun lansia sudah cukup tepat. Adanya fasilitas pendukung untuk membantu lansia dalam mendapatkan layanan Kesehatan, namun tentunya perlu ditingkatkan lagi pada kemampuan Tenaga Kesehatan dalam menghadapi lansia yang tentunya membutuhkan kesabaran ekstra serta banyak yang belum paham tentang prosedur di dalam unit Kesehatan.

g. Komunikasi dan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, peneliti menganalisa bahwa komunikasi dan pemberian informasi pada lansia sudah cukup optimal, akan tetapi perlu ditingkatkan sosialiasi maupun pemberian informasi secara berkala baik melalui peran Wali Nagari maupun peran LKLU.

Sumber Daya

Selain pelatihan komunikasi, sumber daya juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya. Sumber daya menurut George C. Edward III mencakup aspek sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas. Berikut penjelasan penelitiannya:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya tenaga yang kompeten dan terampil dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penambahan sumber daya manusia saja tidak akan cukup, tetapi mereka juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan Kawasan Ramah Lansia, sumber daya manusia yang kompeten dan terampil sangatlah penting. Kualitas pelayanan kepada lansia sangat bergantung pada kompetensi, kesabaran dan keterampilan sumber daya manusia tersebut. Terkait sumber daya manusia, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yang menyatakan bahwa.

Pertama, wawncara Bersama Ibu Dwi Andayani selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial DINSOSP3APPKB, beliau mengatakan:

> *"…Agar kebijakan Ramah Lansia dapat diimplementasikan dengan baik, penting untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan terampil. Mereka harus memiliki pengetahuan yang memadai dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan lansia. Mereka juga perlu mampu memberikan pelayanan dan pendampingan yang responsif dan perhatian kepada lansia. Kami sendiri mengakui bahwa memang tenaga sosial dari pemerintah daerah sangat terbatas, untuk itu kami bekerja sama dengan LKLU yang memiliki ratusan relawan yang bergerak untuk memberdayakan para lansia. Para Wali Nagari juga dilibatkan untuk memberikan bantuan tenaga dalam mendata dan memberi pendampingan dalam setiap acara lansia." (Wawancara tanggal 27 Juli 2023)*

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Ratna Purwanti salah satu tenaga sosial dari LKLU mengungkapkan:

> *"…Sebagai relawan yang ditugaskan di mengurus pendampingan Lansia, saya sangat senang mendampingi para lansia ini, karenan kebanyakan mereka ini masih produktif, kami memberikan pengajaran tentang menjahit, baca tulis, baca Al Quran, hingga pelayanan advokasi hukum bagi lansia yang memiliki masalah hukum. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa lansia dapat terlindungi hak asasi nya dan merasa mendapatkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah." (Wawancara tanggal 26 Juli 2023).*

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan Kawasan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya, penting untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat termasuk lansia. Perlu ada upaya untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada lansia. Informasi mengenai implementasi kebijakan ramah lansia bisa berbentuk sosialisasi maupun layanan media yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nagari. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa informasi yang diberikan kepada lansia cenderung kurang

memadai. Perlu adanya peningkatan dalam memberikan informasi yang relevan dan mudah dimengerti kepada lansia. Khususnya informasi mengenai pemberian bantuan keuangan, kursus dan pelatihan lansia seerta pendampingan advokasi pada lansia.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara kepada salah satu lansia yang mengatakan:

> *"...Saya tidak begitu dapat informasi untuk bantuan keuangan yang diberikan karena tidak pernah mendapat undangan. Kalau untuk pelatihan dari orang dinas sosial, saya tidak mengikuti karena tidak tahu kapan waktu nya saya tidak begitu jelas dan sulit dimengerti." (Wawancara tanggal 28 Juli 2023)*

Hal serupa juga diungkapkan oleh lansia lainnya dalam wawancara mengatakan bahwa :

> *"...Pelayanan dari tenaga sosial kepada kami masih kurang memadai, terutama dalam hal pemberian informasi kursus dan belajar baca tulis. Informasi yang diberikan seringkali sulit dimengerti dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lansia." (Wawancara tanggal 28 Juli 2023)*

Selanjutnya wawancara dengan tenaga sosial di lapangan mengungkapkan:

> *"...Pemberian informasi kepada lansia memang menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal penyesuaian bahasa dan cara penyampaian informasi. Lansia seringkali lebih memilih informasi yang disampaikan secara verbal daripada tertulis." (Wawancara tanggal 26 Juli 2023)*

Berdasarkan wawancara dengan tenaga sosial dan lansia yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penting untuk memberikan informasi kepada lansia dengan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan karakteristik mereka. Hal ini terkait dengan pemberian pelayanan pelatihan lansia dan pendampingan lansia khusus untuk pemberian advokasi dan bantuan hukum serta untuk melindungi lansia itu sendiri dari ancaman dan tindak kekerasan. Untuk itu, pelayanan dan pendampingan kepada lansia harus dilakukan dengan sikap perhatian, responsif, dan menyenangkan.

c. Wewenang

Dalam konteks implementasi kebijakan Kawasan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya, wewenang pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa advokasi sosial, pemberian bantuan hukum, serta perlindungan para lansia dari ancaman dan tindak kekerasan dapat berjalan dengan optimal. Komunikasi yang diperlukan bagi tenaga sosial di LKLU dapat dilakukan dengan tepat. Wewenang pemerintah dapat berupa pengawasan dan pengaturan terhadap pelaksanaan program pelatihan komunikasi bagi tenaga sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga sosial yang ditugaskan di lapangan tersebut memenuhi standar komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan lansia.

d. Fasilitas

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tersedianya fasilitas yang memadai bagi Lansia. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk membangun fasilitas penunjang Kawasan perumahan dan permukiman ruang terbuka serta sarana transportasi yang nyaman bagi lansia. Prioritas anggaran pada pembangunan ini akan sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan kebijakan Kawasan Ramah Lansia tersebut. Secara keseluruhan bahwa implementasi Kebijakan Kawasan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya memerlukan peran aktif dari sumber daya manusia yang kompeten dan terampil, penyediaan informasi yang akurat dan jelas kepada lansia

serta keluarganya, serta fasilitas penunjang yang nyaman dan memadai bagi lansia. Semua faktor ini saling terkait dan harus dikelola dengan baik untuk memastikan Kebijakan Kawasan Ramah Lansia dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi para lansia di Kabupaten Dharmasraya.

Disposisi

Secara keseluruhan, aspek disposisi yang dilihat dari indikator efek disposisi, kesadaran pelaksana dan intensitas respons perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lansia. Pada indikator efek disposisi lebih menekankan pentingnya sikap dan kecenderungan positif dari para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan ramah lansia. Terdapat kesadaran bahwa komitmen dan semangat para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan kebijakan ini. Sosialisasi dan pembinaan terus-menerus diperlukan untuk mempertahankan efek disposisi yang positif. Kesadaran dan partisipasi para lansia sebagai target kebijakan juga disoroti sebagai faktor kunci. Mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan lansia dan dampak positif pelayanan kesehatan terhadap mereka. Upaya-upaya seperti sosialisasi dan pertemuan rutin dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran ini. Intensitas respons pelaksana kebijakan menjadi faktor penting lainnya. Respons yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan lansia mencerminkan komitmen dan dedikasi mereka. Adanya kesadaran akan pentingnya perencanaan yang matang dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan intensitas respons yang baik. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya, perlu adanya kolaborasi antara semua pihak terkait, termasuk tenaga kesehatan dan komunitas lansia itu sendiri. Peningkatan pelatihan komunikasi bagi tenaga kesehatan juga diakui sebagai langkah yang penting dalam meningkatkan intensitas respons yang positif.

Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi yang efektif dan efisien. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, jika struktur birokrasi tidak efektif dan efisien, maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan mengalami hambatan. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya struktur birokrasi yang jelas dan tersusun dengan baik. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif, maka sumber-sumber daya dapat terbuang sia-sia dan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan dengan efektif.

Dalam keseluruhan penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang efektif dan efisien sangat penting dalam implementasi kebijakan ramah lansia. Kesesuaian karakteristik dalam badan-badan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi yang baik antar badan-badan menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan layanan yang baik kepada lansia di Kabupaten Dharmasraya. Terkait dengan temuan yang mengindikasikan adanya kendala dalam pemahaman peran dan tanggung jawab di lapangan, hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan komunikasi dan pemahaman di antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Upaya lebih lanjut harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu memahami perannya dengan baik dan dapat berkontribusi secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan ramah lansia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran akan tantangan dalam membangun koordinasi yang efektif antara berbagai badan terkait. Mungkin perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki saluran komunikasi yang efektif.

KESIMPULAN

Peneliti berpendapat bahwa Kesesuaian karakteristik dalam badan-badan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi yang baik antar badan-badan, serta kesadaran dari lansia yang menjadi target kebijakan menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan layanan yang baik kepada lansia di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesadaran akan tantangan dalam membangun koordinasi yang efektif antara berbagai badan terkait. Mungkin perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki saluran komunikasi yang efektif.

Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ramah lansia. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang memadai, pelatihan bagi tenaga kesehatan, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung. Dukungan pemerintah daerah membuat lansia merasa dihargai dan peduli. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup lansia dan memberikan mereka keyakinan bahwa pelayanan kesehatan mereka akan diutamakan. Selain itu, Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, LKLU dan lembaga swasta sangat penting. Ini memungkinkan pertukaran informasi, sharing pengalaman, dan sinergi dalam penggunaan sumber daya. Koordinasi membantu pemetaan peran dan tanggung jawab setiap lembaga terkait. faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ramah lansia di Kabupaten Dharmasraya terjadi karena keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ramah lansia. Kunci penting dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah melalui berbagai program dan anggaran nya, dibantu oleh penyediaan relawan sumber daya manusia yang memadai dari LKLU. Meskipun ada komitmen pemerintah untuk menyediakan pendanaan yang mencukupi, masih terdapat potensi masalah dalam alokasi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana dapat memunculkan potensi kecurangan dan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Adioetomo, S. M., Cicih, L. H., Asmanedi, & Toersilaningsih, S. (2018). *Menjadi Lansia: Antara Anugerah dan Tantangan. Dalam buku Memetik Bonus Demografi, Membangun Manusia Sejak Dini.* PT. RajaGrafindo Persada.

Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi ke-). Alfabeta.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022* (B. P. S. Barat (ed.)). BPS Provinsi Sumatera Barat.

Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada.

Dinda, N., & Fitra, H. A. (2017). Kesiapan Pembangunan Kota Metro Menuju Kota Ramah Lansia (Age Friendly City) Studi Kasus: Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. *Journal of Planning and Policy Development*, 14.

Dye, R. T. (2013). *Understanding Public Policy*. 14th Edition. Florida: Pearson

Erwanto, R., Kurniasih, D. E., & ... (2020). Pengembangan Dusun Ramah Lansia Melalui Pelaksanaan Sekolah Lansia Di Karet Kabupaten Bantul. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *4*(6), 8–10.

Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta : Gava Media

Lestari, M. D. (2016). Scientific News Magazine Edisi Agustus 2016 Scientific News Magazine Edisi Agustus 2016. *Scientific News Magazine*, *2*(October), 1–5.

Moeleong. (2013). *Metodologi Penenlitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution. (2009). *Metode Research:Penelitian Ilmiah*. PT Bumi Aksara.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.

SurveyMETER. (n.d.). *Policy Brief TANTANGAN MENUJU KOTA RAMAH LANSIA KOTA BANDUNG*. 1–4.

Uny, L., Pendidikan, B., Sosial, K., Besar, B., Pelayanan, P., & Bpks, K. S. (2015). *Kajian tentang kota ramah lanjut usia*. *April*.

Vibriyanti, D. (2018). *SURABAYA MENUJU KOTA RAMAH LANSIA : PELUANG DAN TANTANGAN (SURABAYA TOWARD AGE-FRIENDLY CITY : OPPORTUNITIES AND CHALLENGES)*. *13*(2), 117–132.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Konsepdan Aaplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media. Malang: Bayumedia

Widowati, E., Fafurida, & Prameswari, G. N. (2018). Kajian Kota Semarang Menuju Kota Ramah Lansia. *Riptek*, *12*(12), 21–36.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus*. CAPS.

Yennita, & Mardison, E. (2021). *Analisis Profil Penduduk Provinsi Sumatera Barat Analisis Profil Penduduk Provinsi Sumatera Barat* (Hefinanur, I. T. Raharto, Deswati, & S. Lestari (eds.)). BPS Sumatera Barat.